

PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL

Rahmat Salam

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: rahmat.salam@umj.ac.id

Abstrak

Pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana menetapkan perbedaan yang jelas antara kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam perdebatan kebijakan publik dan bagaimana administrator publik dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang akan mengurangi ketidaksetaraan dunia saat ini. Kesetaraan tidak selalu dipandang sebagai persamaan kondisi ekonomi tetapi terutama sebagai persamaan peluang untuk mencapainya. Inilah mengapa penting untuk mengacu pada konsep keadilan sosial saat menangani ketimpangan. Artikel ini akan meninjau dan menganalisis literatur terkini tentang kemiskinan, ketimpangan, dan keadilan sosial dan akan menyarankan beberapa pendekatan baru untuk menghapus ketimpangan. Meskipun inisiatif yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut harus datang dari politik, administrator publik pada akhirnya akan menjadi orang yang memberikan rencana atau prosedur yang pasti untuk memastikan pemenuhan inisiatif politik ini. Artikel ini akan membahas bagaimana pembuat kebijakan publik dapat mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ketimpangan, Kesetaraan Sosial.

Abstract

The research questions that will be investigated are how to establish a clear distinction between poverty and inequality in public policy debates and how public administrators can formulate and implement policies that will reduce world inequality today. Equality is not always seen as an equation of economic conditions but mainly as an equal opportunity to achieve it. This is why it is important to refer to the concept of social justice when addressing inequality. This article will review and analyze the current literature on poverty, inequality and social justice and will suggest some new approaches to eliminating inequality. Although the initiative required to achieve these objectives must come from politics, the public administrator will ultimately be the one to provide a definite plan or procedure to ensure the fulfillment of these political initiatives. This article will discuss how public policymakers can promote equality and social justice.

Keywords: *Poverty, Inequality, Social Equality.*

A. PENDAHULUAN

Saat membahas peristiwa terkini dalam kebijakan publik, hampir tidak mungkin untuk lepas dari topik ketidaksetaraan dan kemiskinan. Banyak pertanyaan mengenai topik ini yang belum terjawab, seperti bagaimana administrator publik dapat membuat kebijakan publik yang

ARTIKEL

lebih baik, dan juga, bagaimana menerapkan kebijakan inovatif ini yang dapat mulai memperbaiki masalah terkait masalah ini. Pertama, penting untuk membahas makna kemiskinan dan ketimpangan. Keduanya, meski berkorelasi, masih merupakan konsep yang terpisah. Setelah keduanya didefinisikan, maka akan lebih mudah untuk membahas bagaimana ada potensi bagi administrator untuk memulai jalan menuju ekuitas, baik dalam hal solusi fiskal, maupun peluang yang mungkin ada bagi mereka yang terkena dampak. Meskipun, kebijakan terkait kemiskinan dan ketidaksetaraan mungkin tidak akan pernah menghasilkan solusi seratus persen, akan tetapi setidaknya akan memberi dampak.

Teori keadilan sosial juga harus dibahas. Ini untuk lebih memahami ide-ide yang diperlukan untuk memperbaiki setidaknya beberapa tindakan merugikan, perilaku yang terjadi, dan hasil yang berpotensi buruk terkait dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan keseluruhan populasi tertentu, baik di Indonesia maupun internasional. Ini bukanlah proposisi teoretis atau pergeseran paradigma baru, karena konsep keadilan sosial telah terlihat di banyak tempat sepanjang sejarah.

Jadi, seiring dengan berlanjutnya artikel ini, konsep kemiskinan dan ketidaksetaraan akan didefinisikan dan dijelaskan, seperti halnya konsep keadilan sosial dan aspek-aspeknya (misalnya siapa yang termasuk dalam kelas-kelas yang dicakup oleh definisi ini). Selanjutnya, pendekatan yang diharapkan untuk menghilangkan beberapa beban konsep ini akan diberikan dan bagaimana mereka akan diterapkan pada peristiwa terkini. Bersamaan dengan inisiatif ini, kita harus membahas bagaimana pembuat kebijakan publik dapat memperbaiki kegagalan pasar yang dapat terjadi karena ketidaksetaraan. Terakhir, harus disebutkan bahwa ada cara potensial di mana pembuat kebijakan dapat membantu mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Artikel ini akan meninjau dan menganalisis literatur terkini tentang kemiskinan, ketimpangan, dan keadilan sosial dan akan menyarankan beberapa pendekatan baru untuk menghapus ketimpangan sebagai bentuk hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan memiliki arti yang berbeda bagi banyak orang yang berbeda di negara-negara di seluruh dunia. Setiap orang tampaknya memiliki definisi sendiri tentang apa sebenarnya kemiskinan itu. Seperti yang dinyatakan oleh sebuah artikel oleh Ehrenpreis (2006), “apa arti kemiskinan bergantung pada siapa yang mengajukan pertanyaan, bagaimana itu dipahami, dan siapa yang merespon.” Frank Ellis (dalam Suharto, 2005) mengemukakan bahwa kemiskinan memiliki berbagai aspek yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Jika masyarakat memiliki sumber daya ekonomi di bawah target atau standar yang telah ditetapkan, maka disebut kemiskinan.

Suharto (2004) mengungkapkan pengertian kemiskinan adalah penghasilan ditambah uang ditambah dengan manfaat non materi yang diperoleh seseorang. Secara garis besar, kemiskinan meliputi kurangnya atau kurangnya pendidikan, kesehatan yang buruk, dan kurangnya transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Artikel lain tentang kemiskinan dan definisinya, oleh Lok-Dessallien (1999), berisi gagasan lain tentang bagaimana kemiskinan dapat mempengaruhi individu. Dia menganggap orang-orang menjadi miskin jika mereka tidak memiliki kapasitas pendapatan dan jika mereka dirugikan karena kurangnya sumber daya dan material, seperti makanan, layanan, dan standar lain yang diberikan kepada mereka yang berada di luar rentang kemiskinan. Ini menjauhkan mereka dari peran produktif yang seharusnya dapat mereka mainkan dalam masyarakat, dan dari kewajiban, interaksi, dan afiliasi yang biasa dilakukan oleh mereka yang memiliki hak istimewa. Dia juga berpendapat kemiskinan adalah kombinasi dari kebutuhan fisik, dan, seperti yang diisyaratkan sebelumnya, kebutuhan sosial.

Definisi standar kemiskinan biasanya terdiri dari beberapa garis pendapatan yang berubah-ubah di mana, jika seseorang atau keluarga berada di bawah garis tersebut, mereka menjadi miskin dan tidak mampu memenuhi standar dan kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan yang penuh. Dimana garis ini ditarik? Itu berbeda di semua tempat dalam semua budaya. Bahkan di semua daerah ini, sulit untuk menyebutkan ambang batas pasti dari apa yang merupakan kemiskinan, karena ini adalah sesuatu yang biasanya harus disepakati di setiap negara tertentu pada tingkat nasional. Hal ini dapat menyebabkan beragam masalah karena beberapa tempat mungkin membutuhkan lebih banyak dari penghuninya daripada di tempat lain (Hargrove dkk., 2017).

Selanjutnya, penting untuk memahami apa artinya ketidaksetaraan. Meski sering dikaitkan dengan kemiskinan, ada perbedaan mencolok di antara keduanya (Svara & Brunet, 2005). Terdapat banyak literatur tentang kedua topik dengan pembagian sederhana satu sama lain, yang sering diabaikan oleh banyak orang, termasuk politisi dan pembuat kebijakan. Kaplinsky (2013), menjelaskan perbedaan antara dua topik ini dengan cukup pelit dengan menyatakan "kemiskinan adalah ketika orang tidak memiliki banyak dan ketidaksetaraan adalah ketika beberapa orang memiliki lebih dari yang lain." Kemiskinan lebih merupakan konsep individu, diterapkan pada seseorang atau keluarga (tetapi dapat menandakan ketika suatu negara termasuk dalam kategori dunia pertama, kedua, atau ketiga), sedangkan ketidaksetaraan membahas distribusi kekayaan dalam masyarakat atau perbedaan dalam akses ke layanan yang berbeda karena individualitas orang. Penekanan ditempatkan pada kekayaan karena kekayaan pun dapat memiliki definisi yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kemiskinan merupakan suatu konsep yang mempengaruhi bagaimana seseorang dapat menjalani kehidupan yang produktif. Ketimpangan adalah konsep distribusi; beberapa orang datang untuk memiliki lebih dari yang lain. Dalam kombinasi dari kedua topik inilah keadilan sosial harus ditangani (Hidayat, 2017).

Konsep keadilan sosial pada awalnya disajikan kepada mereka yang berada di bidang Administrasi Publik oleh H. George Frederickson pada tahun 1990. Keadilan dan pengelolaan yang adil dari semua lembaga yang melayani publik secara langsung atau melalui kontrak, keadilan dalam pelayanan publik, pemerataan dan pelaksanaan kebijakan publik yang adil, dan komitmen untuk memajukan keadilan dan kesetaraan dalam pembentukan kebijakan publik.

Dan sejak diperkenalkan selanjutnya diidealkan sebagai pilar ketiga dari administrasi publik, dibelakang efisiensi dan ekonomi (Nijaki, 2015). Ini menandakan betapa pentingnya kesetaraan sosial dalam perubahan yang perlu dan harus dilakukan terkait kebijakan publik di negara-negara di seluruh dunia, karena ini adalah sesuatu yang tidak hanya memengaruhi kita di sini, di Indonesia. dan meskipun kebijakan internasional ada untuk menyeimbangkan cara orang diperlakukan, tidak ada dua orang yang diperlakukan sama.

Definisi keadilan sosial harus dijelaskan jika literatur ingin membantu dalam penemuan dan pengembangan kebijakan baru dan inovatif untuk memperbaiki situasi di negara-negara yang menghadapi kemiskinan dan ketidaksetaraan, yang sayangnya, ada di mana-mana di dunia. Saat

mendefinisikan keadilan sosial (atau ketidaksetaraan), kelompok individu tertentu yang berlabel kelas dilindungi terpengaruh.

Kebetulan individu-individu dan keluarga-keluarga yang berada dalam kelas-kelas bawah yang dilindungi cenderung menjadi orang-orang yang paling terkena dampak kemiskinan, bahkan jika kebijakan dan program telah dibuat untuk menyamakan ketidakadilan yang dihadapi oleh populasi-populasi ini (Gilder, 2013). Dengan demikian, kampanye presiden, serta kampanye politisi nasional, gubernur, dan bahkan bupati, seringkali berfokus pada kebijakan lebih lanjut untuk membantu memerangi masalah sosial kemiskinan dan ketimpangan. Kesetaraan sosial adalah yang paling penting untuk kampanye ini, tetapi politisi tampaknya mengaburkan makna kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam perdebatan dan / atau platform mereka. Atau, yang lebih buruk tentang masalah ini, para kandidat tampaknya hampir tidak membahasnya sama sekali. Hal ini terutama terjadi ketika membahas ketidaksetaraan ras yang juga terkait dengan distribusi yang tidak setara lainnya, tidak hanya dalam topik seperti pendapatan dan kekayaan, tetapi juga dalam pendidikan tinggi, dan aspek kehidupan lainnya (Unterhalter & North, 2017).

Sudah diketahui umum bahwa pendidikan dikaitkan dengan hasil yang lebih baik dalam gaya hidup, tetapi juga dibuktikan dengan baik bahwa akses ke sekolah yang lebih baik sedikit lebih mudah bagi orang yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan (Bassett, 1993; Yigitcanlar, 2010). Tindakan afirmatif telah diterapkan selama beberapa dekade untuk menyamakan kedudukan bagi orang Indonesia yang tinggal di pusat-pusat pendidikan. Tapi, meski begitu, ketimpangan masih ada dalam bentuk yang jelas. Unterhalter & North (2017), membahas hal ini dalam artikelnya. Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan orang-orang di seluruh administrasi negara bertujuan untuk memperbaiki masalah ketimpangan sosial, menggunakan tindakan afirmatif sebagai alat kebijakan. Sayangnya, mereka mengatasinya ketika mereka perlu, tetapi hanya ketika mereka perlu, seperti ketika suara diperlukan untuk pemilihan atau untuk supaya undang-undang disahkan. Ketidaksetaraan, kemiskinan, dan hak atas kehidupan yang baik bagi semua warga seringkali muncul saat kampanye, namun jika sampai pada hal itu, isu tersebut sepertinya tidak membawa hasil (Suyanto, 2005).

Justifikasi untuk kebijakan ini mudah dibuat. Misalnya, jika kebijakan publik yang diturunkan dari kampanye dapat mengatasi kekhawatiran warga dari kelas bawah yang dilindungi yang terdaftar, memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk rasa kesejahteraan yang lebih baik, mereka tidak perlu merasa seolah-olah suara mereka tidak didengar. Mereka

tidak akan merasa seolah-olah hidup mereka tidak penting. Kedua isu ini juga penting untuk disikapi secara global, bukan hanya karena harkat dan martabat kemanusiaan, tetapi karena banyaknya kelompok teroris yang seringkali mengeksplorasi kehidupan mereka yang miskin dan yang terpengaruh oleh ketidaksetaraan. Sangat disayangkan bahwa kelompok masyarakat ini dieksplorasi oleh orang-orang yang berkuasa, namun tampaknya tetap menjadi masalah sepanjang sejarah. Oleh karena itu, jawabannya benar-benar terletak pada pengembangan kebijakan publik yang akan memungkinkan mereka yang berada di kelas yang dilindungi memperoleh dasar dan diperlakukan lebih setara dalam masyarakat di seluruh dunia. Seperti disebutkan sebelumnya, ini akan menuntut bangsa di seluruh dunia bekerja sama untuk mengembangkan solusi sehingga orang-orang dari semua lapisan masyarakat dapat mendekati, dan melampaui, garis di mana mereka keluar dari kemiskinan, menjalani kehidupan yang jauh lebih bermartabat dan produktif.

Menurut laporan BPS (2018), kesenjangan kekayaan yang semakin lebar mendorong lebih banyak rumah tangga ke kelompok berpenghasilan lebih tinggi atau lebih rendah di area perkotaan, dengan lebih sedikit yang tersisa di tengah. Di hampir seperempat wilayah perkotaan, orang dewasa kelas menengah tidak lagi menjadi mayoritas. Dengan disparitas yang tumbuh di antara kelas-kelas sosial-ekonomi, banyak warga Indonesia sekarang merasa bahwa ada tingkat ketidaksetaraan akses di antara anggota masyarakat yang berbeda. Contohnya adalah kehancuran perekonomian akibat krisis tahun 2008. orang Indonesia tidak lagi diharapkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan cukup uang untuk membeli rumah. Kemampuan untuk memiliki akses untuk membeli rumah telah identik dengan impian orang Indoinesia. Ini adalah norma sosial di mana semua warga negara merasa diberi hak untuk memiliki rumah. Karena hak untuk memiliki rumah terancam oleh resesi hebat 2008 dan keruntuhan pasar perumahan 2008, warga meminta pemerintah turun tangan. Responnya adalah pemerintah mengembangkan kebijakan yang menjawab kebutuhan warganya. Program pembiayaan kembali rumah bersubsidi telah dibuat. Setelah Kebijakan dan perundang-undangan disahkan, menjadi tugas administrator publik untuk menentukan bagaimana menerapkan kebijakan ini untuk kepentingan warga negara.

Banyak ahli memperingatkan bahwa melebarnya ketimpangan pendapatan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mempersulit mobilitas sosial. Penelitian telah menemukan bahwa dibandingkan dengan anak-anak di komunitas yang lebih tercampur secara

ekonomi, anak-anak yang dibesarkan di lingkungan berpenghasilan rendah cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk mencapai kelas menengah (Jati, 2015).

Thruow (1987) mendefinisikan kelas menengah sebagai sekelompok orang yang pendapatannya antara 75% dan 125% dari median (titik tengah) per kapita. Oleh karena itu, menurut definisi ini, *floor* (batas bawah) kelas menengah adalah 75% dari median pendapatan per kapita. Pada saat yang sama, batas atasnya adalah 125% dari pendapatan median per kapita. Sedangkan Easterly (2001) mendefinisikan kelas menengah dengan membagi penduduk dari yang termiskin ke yang terkaya menjadi lima kelompok pengeluaran konsumsi yang identik (*quintiles*). Menurut Easterly, kelas menengah diperoleh dengan mendistribusikan *quintiles* terendah (20% kelompok masyarakat termiskin) dan *quintiles* tertinggi (20% kelompok masyarakat terkaya). Oleh karena itu, kelas menengah merupakan kelompok yang pengeluaran per kapita-nya berada pada *quintiles* kedua, ketiga dan keempat.

Sedangkan untuk Indonesia dan negara-negara Asia umumnya definisi yang lebih cocok dikeluarkan oleh Asia Development Bank (ADB). ADB (2010), mendefinisikan kelas menengah dengan pengeluaran harian per kapita berkisar antara US \$ 2-20. Kisaran ini sekarang banyak digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan menengah di Indonesia. Kisaran pengeluaran per kapita dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelas menengah ke bawah menghabiskan 2-4 dolar AS per orang per hari; kelas menengah 4-10 dolar AS; dan kelas menengah atas 10-20 dolar AS (PPP tahun 2005). Dengan pengeluaran antara US \$ 2 dan US \$ 20, jumlah kelas menengah di Indonesia adalah 134 juta (2010), terhitung sekitar 56% dari total penduduk, yang cukup besar.

Banyak rekomendasi telah diberikan sepanjang sejarah untuk memperbaiki kondisi yang ada di seluruh dunia terkait dengan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kesetaraan sosial. Dan, meskipun banyak kebijakan yang dibuat oleh administrator telah mengurangi kesenjangan, beberapa hanya merupakan perbaikan sementara (Lindert & Williamson, 2003). Dalam ekonomi global di mana segala sesuatunya berubah secara harfiah dalam semalam, penting agar kebijakan ini terus menyesuaikan diri dengan situasi dinamis ini. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menyarankan bahwa kita sebagai manusia seharusnya memperlakukan semua orang dengan sama, tanpa memandang ras, jenis kelamin, faktor budaya, etnis, orientasi seksual, dll. Jika ini bisa dilakukan, bidang administrasi publik tidak akan diperlukan. Sebaliknya, prasangka ini sudah ada sejak lama. Mereka masih ada hari ini, bahkan, dan sepertinya tidak akan menghilang dalam waktu dekat, jika mereka akan menghilang.

ARTIKEL

Pasar perlu disesuaikan untuk memasukkan lebih banyak orang yang dipengaruhi oleh label ekuitas sosial mereka. Hukuman kemiskinan merupakan hal yang sangat nyata dan konsekuensial, merugikan mereka yang harus dilindungi. Saya juga dapat memperluas hukuman kemiskinan ke masalah keadilan sosial lainnya. Kemiskinan mungkin bukan satu-satunya alasan mengapa individu menghadapi biaya yang lebih tinggi, prasangka juga dapat menyebabkan hukuman. Tentu, pendapatan memperburuk masalah, seperti juga kemungkinan peningkatan risiko karena lingkungan tempat tinggal orang (Nijaki, 2015). Informasi harus dikumpulkan tentang pasar apa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor apa, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang mengarah ke indikator-indikator yang menangani kemiskinan, ketimpangan, dan mengapa eksklusi pasar terjadi (Mendoza, 2011). Mengetahui apa yang menyebabkan masalah-masalah ini dapat membantu fokus lebih sempit pada kebijakan publik yang diperlukan untuk membawa mereka yang terkena dampak ke pijakan yang lebih adil dan adil, untuk mendekati mereka yang berpartisipasi dalam pasar saat ini. Ketika berhadapan dengan kebijakan publik, perusahaan swasta tidak boleh dikecualikan, karena masukan mereka dapat membantu memandu kebijakan publik, setidaknya dalam bagaimana informasi dikumpulkan. Terkadang menggunakan perusahaan swasta sebagai model dapat membantu menyelaraskan organisasi publik dengan tujuan yang tepat. Meskipun kedua pasar berfungsi secara berbeda, beberapa model bisnis dapat membantu. Sayangnya, perlu waktu untuk meneliti solusi potensial ini, waktu yang mungkin tidak dimiliki oleh kelas yang dilindungi.

Penting juga untuk mengatasi faktor geografis yang ada dalam meningkatkan keparahan keadilan sosial. Sulit untuk memperlakukan semua lokasi dengan cara yang sama karena bahkan dalam geografi dasar mereka berbeda. Semua area memiliki pro dan kontra, tetapi penting bahwa mereka yang berada di area yang tidak sekaya (tidak peduli cara mendefinisikannya), diperlakukan sama seperti produk dan layanan yang ditawarkan. Diperlukan banyak kebijakan besar untuk menyertakan semua orang dengan cara yang sama. Administrator publik baru saja mulai menangani masalah ini. Ada banyak hal yang bisa diperbaiki dalam hal ini, terutama ketika membahas kebijakan yang memberikan transparansi dan akuntabilitas, yang perlu lebih terlihat dalam peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Dengan munculnya reformasi baru dalam Administrasi Publik, lingkungan di mana administrator publik harus bekerja dalam beberapa tahunterakhir juga berubah secara signifikan. Administrator publik diminta untuk melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Administrator publik tidak hanya perlu unggul dalam bidang keahlian tradisional mereka, tetapi mereka juga sekarang diminta untuk menguasai serangkaian keterampilan baru di mana mereka dapat mempromosikan kerja sama di antara banyak pemain baru yang hadir dalam penyampaian kebijakan publik kepada masyarakat. Ini adalah tugas administrator publik untuk mengukur disparitas yang diciptakan di antara kelas sosial ekonomi dan mengambil tindakan korektif sambil mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh inisiatif pejabat pemerintah terpilih.

Seperti disebutkan sebelumnya, setelah pejabat pemerintah memutuskan jenis kebijakan yang akan digunakan, administrator publiklah yang bertugas mengubah ideologi luhur ini menjadi tindakan nyata yang dapat diterapkan. Peran administrator publik dalam menghilangkan ketidaksetaraan bermacam-macam. Administrator publiklah yang harus menafsirkan kebijakan, membuat aturan dan peraturan, mengembangkan prosedur, melaksanakan program dan layanan yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut, mengembangkan indikator untuk mengukur keluaran dan hasil program serta mengevaluasi program untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan sesuai. Semua ini dilakukan agar semua anggota masyarakat dapat diberikan kesempatan dan akses yang sama terhadap layanan, termasuk kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, keuangan, pekerjaan, keamanan umum, dan kemampuan untuk memenuhi potensi diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). Data dan Informasi Kemiskinan 2016 dan 2017. Jakarta: BPS Jakarta.
- Bassett, K. (1993). Urban cultural strategies and urban regeneration: a case study and critique. *Environment and Planning A*, 25(12), 1773-1788.
- Easterly, W, 2001. The Middle Class Consensus and Economic Development. *Journal of Economic Growth* 6, 317-35.
- Ehrenpreis, D. (2006). *What is poverty? Concepts and measures* (No. 9). International Policy Centre for Inclusive Growth.

ARTIKEL

- Frederickson, H. G. (1990). Public administration and social equity. *Public Administration Review*, 50(2), 228-37.
- Gilder, G. (2013). *Knowledge and power: The information theory of capitalism and how it is revolutionizing our world*. Regnery Publishing.
- Hargrove, D. S., Curtin, L., & Kirschner, B. (2017). Ruralism and regionalism: Myths and misgivings regarding the homogeneity of rural populations. In *Handbook of rural school mental health* (pp. 249-259). Springer, Cham.
- Hideyat, A. (2017). Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Jati, W. R. (2015). Less cash society: Menakar mode konsumerisme baru kelas menengah Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, 14(2), 102-112.
- Kaplinsky, R. (2013). *Globalization, poverty and inequality: Between a rock and a hard place*. John Wiley & Sons.
- Lindert, P. H., & Williamson, J. G. (2003). Does globalization make the world more unequal?. In *Globalization in historical perspective* (pp. 227-276). University of Chicago Press.
- Lok-Dessallien, R. (1999). Review of poverty concepts and indicators. *UNDP Soc Dev Poverty Elimin Div Poverty Reduct Ser* from <http://www.undp.org/poverty/publications/povReview.pdf>, 21.
- Nijaki, L. K. (2015). Justifying and juxtaposing environmental justice and sustainability: towards an inter-generational and intra-generational analysis of environmental equity in public administration. *Public Administration Quarterly*, 39(1), 85-116.
- Suharto, E. (2004). Kemiskinan dan keberfungsian sosial: studi kasus rumah tangga miskin di Indonesia. *Bandung: STKSPress*.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suyanto, B. (2005). *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Svara, J. H., & Brunet, J. R. (2005). Social equity is a pillar of public administration. *Journal of Public Affairs Education*, 11(3), 253-258.
- Thurow, L. C. (1987). A surge in inequality. *Scientific American*, 256(5), 30-37.
- Unterhalter, E., & North, A. (2017). *Education, poverty and global goals for gender equality: How people make policy happen*. Routledge.
- Yigitcanlar, T. (2010). Knowledge-based development of cities: a myth or reality?. *International Journal of Knowledge-Based Development*, 1(3), 153-157.